

**Ruang
Lingkup**

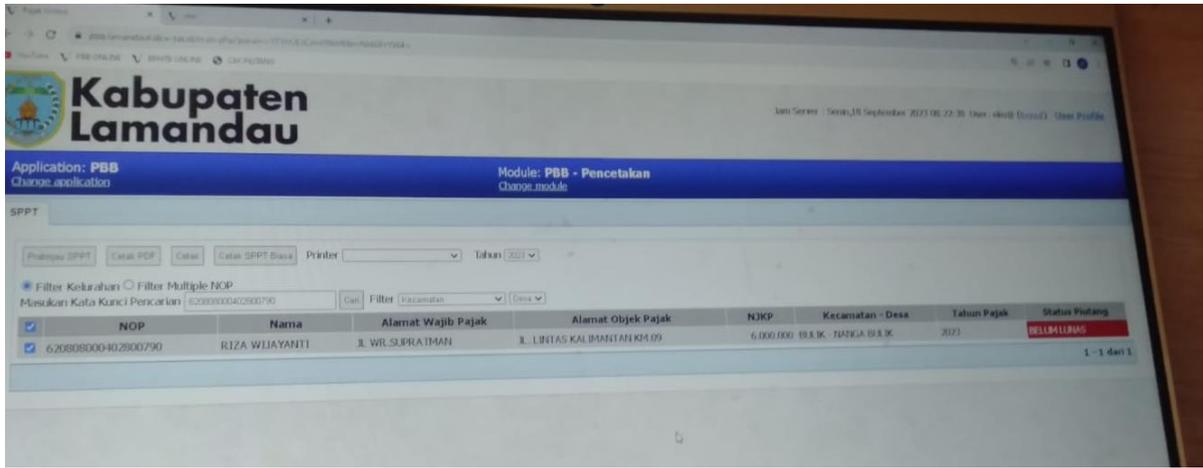
- Layanan keuangan berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan **didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan**
 - Dokumentasi **pemanfaatan sistem aplikasi**
 - **Penjelasan** mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)
 - Manual Book (jika ada, untuk **panduan penggunaan aplikasi**)
 - Bukti optimalisasi

Indikator 34: Layanan Keuangan

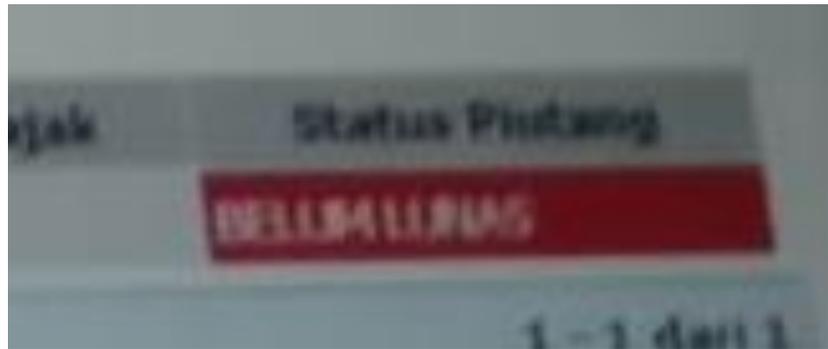
1. Pelayanan proses pembayaran PBB – P2

Wajib pajak datang ke tempat pelayanan pajak PBB – P2 untuk melakukan pembayaran





Sebelum dilakukan pembayaran pada aplikasi muncul keterangan belum lunas



Wajib pajak melakukan pembayaran melalui BRI



Setelah masuk loket pelayanan proses selanjutnya berkas masuk ke bagian pendataan dan akan dilakukan penelitian lapangan oleh bagian pendataan



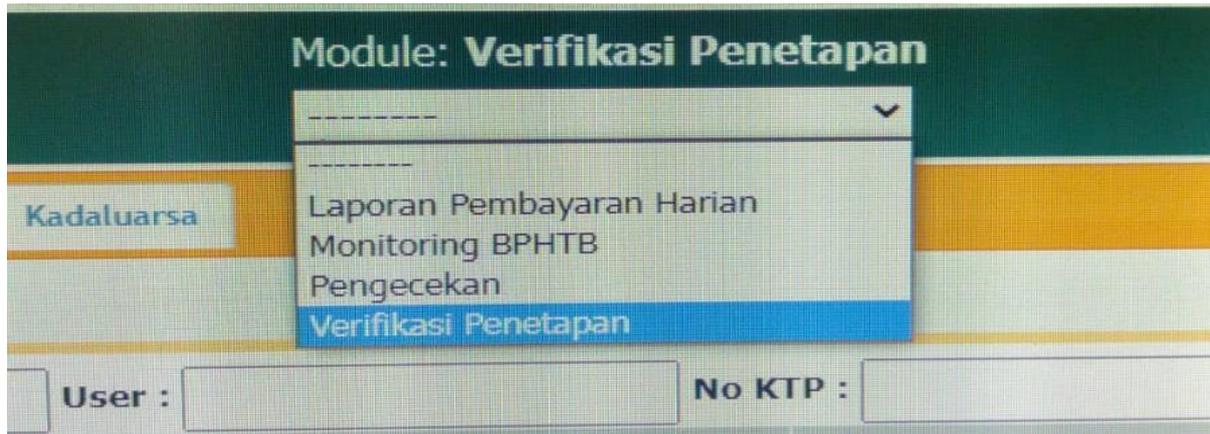
Melakukan verifikasi lapangan



Bukti kertas kerja penelitian BPHTB pada aplikasi

A printed form with various fields and checkboxes. The form is titled "BUKTI KERTAS KERJA PENELITIAN BPHTB PADA APLIKASI". It contains sections for "A. Data Penelitian", "B. Data Penelitian", and "C. Data Penelitian". The form is filled out with handwritten text and has a signature at the bottom.A printed form with various fields and checkboxes. The form is titled "BUKTI KERTAS KERJA PENELITIAN BPHTB PADA APLIKASI". It contains sections for "A. Data Penelitian", "B. Data Penelitian", and "C. Data Penelitian". The form is filled out with handwritten text and has a signature at the bottom.

Setelah selesai verifikasi lapangan, dilakukan verifikasi penetapan pada aplikasi



Bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) diterbitkan untuk memproses pembayaran BPHTB yang dilakukan oleh Wajib Pajak



Pembayaran melalui aplikasi telah dilakukan dengan bukti bayar terlampir, maka akan dibubuhkan cap dan ttd pada SSPD



Optimalisasi kebijakan pelayanan

PELAYANAN PBB-P2 DAN BPHTB KABUPATEN LAMANDAU



Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, bahwa Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dari sektor PBB dan BPHTB.

Pelayanan pajak daerah sektor PBB-P2 dan BPHTB kepada masyarakat di Kabupaten Lamandau mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2019

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, mulai tahun 2021 pelayanan PBB-P2 dan BPHTB Kabupaten Lamandau telah berbasis web / online terintegrasi yang sebelumnya masih berbasis offline tidak terintegrasi. Aplikasi PBB-P2 dan BPHTB ini telah terintegrasi dengan aplikasi pertanahan pada BPN, dan kedepannya diupayakan pengintegrasian dengan aplikasi perijinan dan kependudukan.

Dengan adanya system yang berbasis online dan terintegrasi ini, masyarakat semakin mudah untuk mengakses pelayanan PBB-P2 dan BPHTB baik untuk cek data dan tagihan ataupun pembayaran, serta dalam pengawasan dan pengendalian internal bisa lebih optimal.

Akses Cek Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB untuk Masyarakat

dengan alamat website: <https://cekpajak.lamandaukab.go.id/>

Daftar Tagihan SPPT PBB

ID WAJIB PAJAK

NOP

KODE VERIFIKASI

Aplikasi PBB-P2 dengan alamat website: <https://pbb.lamandaukab.go.id/>

Kabupaten Lamandau

Jain Server : Minggu, 14 Mei 2023 19:46:55 User: fathun@ (Logout) User Profile

Tahun Berjalan (56,200) * Tunggakan (291,146,103) = Total Pembayaran (291,202,303)

Application: PBB Module: Monitoring

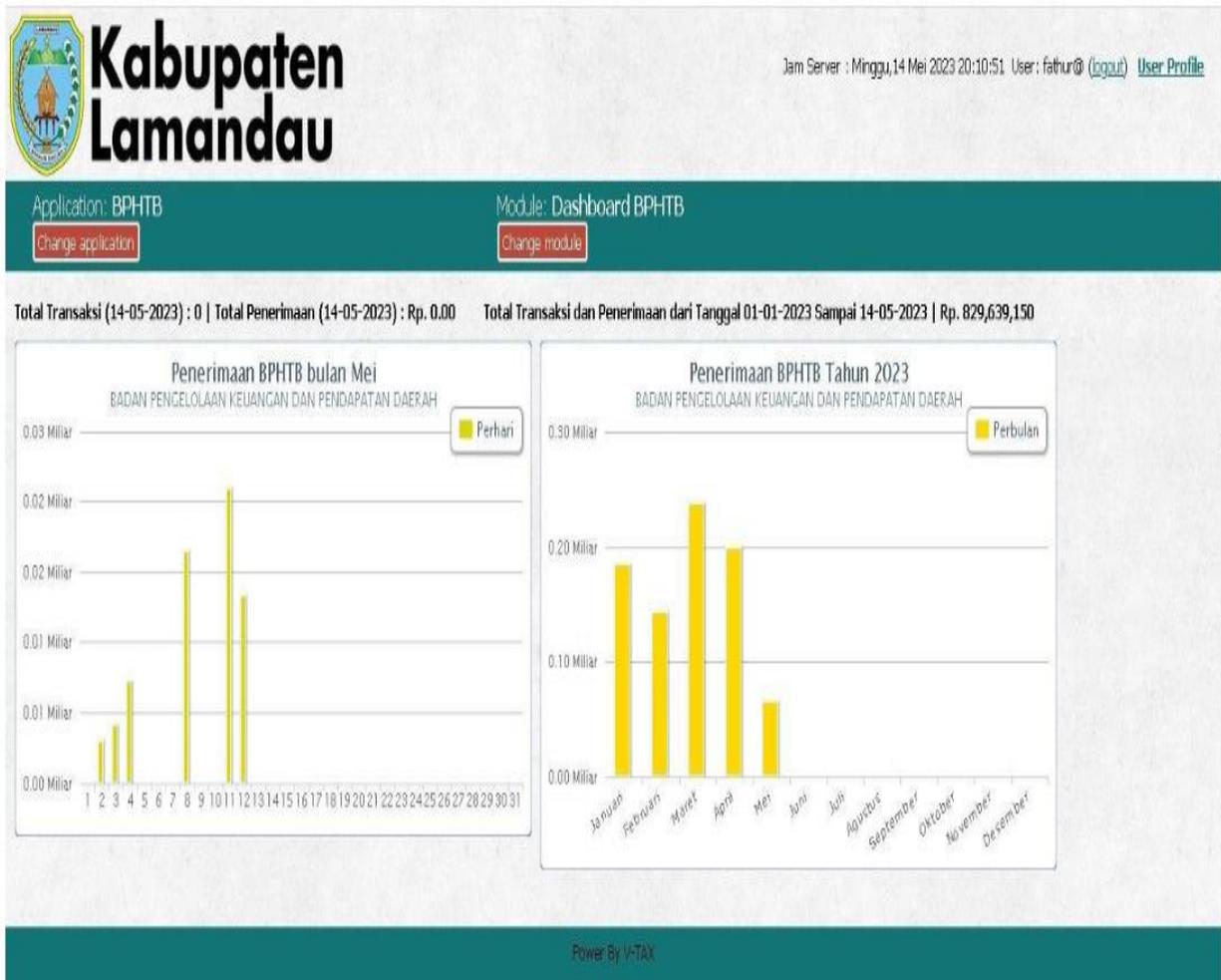
Salah Bayar, Belum Bayar, Realisasi, Realisasi Tunggakan, Rekap Tunggakan, Detail Tunggakan, Rekapan Murni, Realisasi 2011 - 2023, Rekap Penetapan, Penetapan, Rekap Retetapan, Rincian SPPT & DIHKP, Realisasi Pedesaan & Perkotaan, Rekap NJOP, Mutang, Penyisihan Mutang, Saldo Mutang, Rekap DIHKP, Detail Pembayaran, OP Ringkas, Statistik NJOP, Rekap Pelayanan, Rekap Penerimaan, DIHRD, Rekap Bangunan, Rekap Bumi Bangunan, Rincian Retetapan, Rincian Data SPPT

Tahun Pajak : 2023 Kecamatan : BULUK Desa : Pih Semus Status Penetapan : Semus

REKAP DIHKP TAHUN 2023										
NO	NOP	NAMA	ALAMAT WAJIB PAJAK	RT	RW	KELAS TANAH	KELAS BANGUNAN	LUAS BUMI	LUAS BANGUNAN	TAGIHAN
1	620000000100101199	MUHAMMAD RISKI SUHAJI	DESA BATU KOTAM	001	000	000	XXX	15.000	0	97.250
2	620000000100101100	MUHAMMAD RISKI SUHAJI	DESA BATU KOTAM	001	000	000	XXX	15.000	0	107.250
3	620000000100101170	NURYADI	DESA PURWAREJA	009	004	000	XXX	15.000	0	97.250
4	620000000100201200	KURAN	ILJAYANG KARYA	002	000	009	XXX	18.000	0	80.000
5	620000000100101160	NURYADI	DESA PURWAREJA	009	004	009	XXX	6.831	0	34.155
6	620000000100101150	JUMZATI	DESA BATU KOTAM	001	000	009	XXX	10.079	0	40.395
7	620000000100101140	ERNI	JURADEN PARU	006	000	009	XXX	14.373	0	61.665
8	620000000100101130	DEWI ANGGRAINI	DESA BATU KOTAM	002	000	009	XXX	10.025	0	40.125
9	620000000100300010	KASAN	IL TRAHIS KALIMANTAN	002	000	009	XXX	20.000	0	100.000

Power By V-TAX

Aplikasi BPHTB dengan alamat website: <https://bphtb.lamandaukab.go.id/>



Selain itu untuk lebih memudahkan masyarakat dalam pembayaran, Pemerintah Kabupaten Lamandau telah memperluas *Channel* Pembayaran PBB-P2 dan BPHTB yang sebelumnya hanya dengan Bank BRI, pada tahun 2022 lalu juga telah terjalin kerjasama penerimaan pembayaran PBB-P2 dan BPHTB melalui BPD Kalteng, Bank Mandiri, BNI dan Pos Indonesia serta penambahan fitur pembayaran melalui Qris BRI pada tahun 2023 ini.

Jadi untuk pembayaran PBB-P2 dan BPHTB, selain pembayaran tunai melalui loket BPKPD atau teller pada *Channel* Bank atau Kantor Pos Indonesia, masyarakat dapat melakukan pembayaran secara non tunai melalui ATM, Mbanking pada masing-masing Bank atau aplikasi Pos Pay untuk Pos Indonesia.

Dengan upaya perubahan system berbasis web / online terintegrasi, perluasan Channel pembayaran serta upaya ekstensifikasi diatas, realisasi PBB-P2 dan BPHTB Kabupaten Lamandau mengalami tren positif sebagaimana dapat terlihat pada tabel berikut :

NO	JENIS PAJAK DAERAH	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1	BPHTB	8.233.096.950	5.118.706.125	37.032.118.857	13.105.472.505
	Korporasi	6.558.791.075	2.934.227.450	34.659.427.061	10.428.497.854
	WP Pribadi	1.674.305.875	2.184.478.675	2.372.691.796	2.676.974.651
	Jumlah OP	1.507	539	757	606
2	PBB - P2	2.766.949.827	3.226.093.787	4.005.650.509	4.823.088.193
	Jumlah OP	47.832	51.489	56.122	59.985